



## **SKM SEKRETARIAT DPRD BALANGAN SEMESTER I TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT pelaksanaan penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2023 telah diselesaikan.

Kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik Tahun 2023 ini diselenggarakan mulai bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023. Disusunnya laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat ini dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai PERMENPAN RB RI Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan merupakan salah satu alat yang bisa digunakan oleh unit pelayanan publik untuk mengevaluasi kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh unit tersebut.

Yang dapat menjadi gambaran persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima, dan dijadikan pedoman dalam perbaikan kualitas kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan selain itu Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat dan Rekomendasi serta beberapa catatan berdasarkan pelaksanaan survei kami sampaikan dalam laporan ini, agar dapat menjadi masukan untuk pelayanan publik di Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan.

Dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan berbagai pihak hingga pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terlaksana dengan lancar.

Semoga Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Paringin, Juli 2023

Sekretaris DPRD  
Kabupaten Balangan

**H.TAMRIN,S.Ag,SE,MAP**

**Pembina TK.I / IV b**

**19731224 199403 1 007**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1-1
1.2. Peraturan Perundangan.....	1-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1-2
1.4. Ruang Lingkup.....	1-2
BAB 2 PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI	
2.1. Pelaksanaan .....	2-1
2.2. Teknik Survei .....	2-1
BAB 3 HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	
3.1. Hasil SKM Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan.....	3-1
3.2. Hasil SKM Bagian Lingkup Sekretariat DPRD Balangan.....	3-2
BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
4.1. Kesimpulan .....	4-1
4.2. Rekomendasi .....	4-1



## PENDAHULUAN

### 1.1.LATAR BELAKANG

Upaya mewujudkan pelayanan prima di instansi pemerintah telah dimulai sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Publik. Pada tahun 1995, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat yang kemudian dikonkritkan dengan Surat Edaran Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Penertiban Aparatur Negara Nomor 56/Wasbangpan/6/1998 tentang Langkah-langkah Nyata Memperbaiki Pelayanan Masyarakat.

Pada tahun 2017 dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik menggantikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Publik Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, di dalamnya diatur tentang kegiatankegiatan yang harus dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang bermutu. Dimana salah satu kegiatan yang harus ada adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat sehingga pemerintah Daerah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan dibutuhkan dan diharapkan

Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan visi dan misinya, maka Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan melaksanakan pengukuran “Kepuasan Masyarakat” Khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Fasilitas pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.



Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk mendapatkan feed back/ umpan balik atas kinerja/ kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna perbaikan/ peningkatan kinerja/ kualitas pelayanan secara berkesinambungan.

## **1.2. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya pelayanan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan sebagai fungsi administratif.

## **1.3. SASARAN**

Sasaran dalam dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik, yaitu :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

## **1.4. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat mencakup entitas yang tertera pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi:

1. Persyaratan.

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.



3. Waktu Penyelesaian.

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif.

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggaraan dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan yang diberikan oleh masing- masing bagian.

6. Kompetensi Pelaksana.

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana.

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak ( Gedung ).

9. Penanganan Pengaduan,

Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.



## PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

### 2.1. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melaksanakan survei;
5. Mengolah hasil survei;
6. Menyajikan dan melaporkan hasil.

Tahapan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ini didasarkan pada metode dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 2.2. TEKNIK SURVEI

A. Survei Untuk melakukan survei dapat menggunakan teknik survei, antara lain:

1. Kuesioner dengan wawancara tatap muka;
2. Kuesioner melalui pengisian sendiri oleh penerima layanan
3. Diskusi kelompok terfokus;
4. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam.



## B. Metode Pengolahan Data

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap misal 6 (Enam ) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai Persepsi perunsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 Anggota DPRD maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} \quad \text{Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk menambah unsur yang dianggap relevan memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan pencatatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.



Tabel 2.1

Interval Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kab.Balangan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Rumus menghitung IKU Frekwensi Ketidakpuasan Anggota Dewan Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD	Ring Penilaian
a. Sangat Puas	81-100
b. Puas	61-80
c. Cukup Puas	41-60
d. Kurang Puas	21-40
e. Tidak Puas	0-20

C. Perangkat Pengolahan

Pengolahan data dilakukan dengan perangkat sistem komputerisasi dilakukan dengan program komputer sistem data base.

D. Pengujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukan ke dalam data base masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis obyektivitas.



## E. Hasil

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan pelayanan publik, dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik di Sekretariat DPRD Kab.Balangan.
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik Sekretariat DPRD Kab.Balangan .
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. Masyarakat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



## HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

### 3.1. HASIL SURVEI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

Hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) telah disusun dan di perbaiki sesuai arahan yang di bina oleh bidang ortal Sekretariat Daerah . Perbaikan oleh bagian-bagian yang melakukan pelayanan langsung di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan yang kemudian diolah dan dianalisa lebih lanjut sehingga diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat. Pada tahun 2023 dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan yang ada pada 6 unit layanan yakni, Unit layanan Kajian Perundang-undangan, Unit layanan Risalah, Persidangan dan Publikasi , Unit layananFasilitasi Pengawasan, unit layanan Fasilitasi Penganggaran, unit layanan Umum, dan Unit layanan Program dan Keuangan.

Kegiatan Penyusunan/Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023 pada Unit Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan dilaksanakan pada 6 (Enam ) Unit Pelayanan Publik. Adapun Unit Pelayanan Publik yang melaksanakan SKM ini merupakan Unit Organisasi atau Bagian yang ada pada Sekretariat DPRD Balangan. Dari pelaksanaan penilaian SKM pada Unit Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan diperoleh hasil nilai rata-rata **83,76** dengan mutu pelayanan A dan Kinerja Pelayanan Sangat Baik dari rekapitulasi hasil survei Semester I di Unit Organisasi / Bagian yang melaksanakan SKM Tahun 2023 termuat dalam rekapitulasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Nilai SKM	Kinerja Unit Pelayanan	Unsur Penilaian			Dasar Hukum
				Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nama Unsur	
1	Bagian Risalah,Persidangan dan Publikasi	82.83	B	3.24	3,56	Tertinggi : Kompetensi Pelaksana Terendah : Sarana dan prasarana	
2	Bagiaan Kajian Perundang-Undangan	84.92	B	3,04	3.96	Tertinggi : Sistem,Makanisme Prosedur Terendah : Biaya / Tarif	
3	Bagian Fasilitasi Pengawasan	81.07	B	2.96	3,56	Tertinggi : Kompetensi Pelaksanaan Terendah : Biaya / Tarif	
4	Bagian Fasilitasi Penganggaran	82.72	B	3.00	3,88	Tertinggi : Sarana dan prasarana Terendah : Perilaku pelaksana	
5	Bagian Umum	82.28	B	3,00	3,60	Tertinggi : Perilaku pelaksana Terendah : Penanganan Pengaduan	
6	Bagian Program dan Keuangan	83.38	B	3,20	3,64	Tertinggi : Sarana dan prasarana Terendah : Penanganan Pengaduan	

## 3.2. HASIL SURVEI BAGIAN LINGKUP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN

### BALANGAN

Untuk kegiatan Penyusunan/Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) semester I Tahun 2023 pada Unit Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan yang dilaksanakan pada 6 (Enam) Unit Pelayanan Publik dapat dilihat dari uraian tabel masing-masing penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat:

Dasar penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu Permenpan Nomor : 14 Tahun 2017, dari pelaksanaan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Unit Pelayanan Publik yang ada di 6 (Enam ) bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan diperoleh hasil nilai 83,76 dengan mutu pelayanan A dan Kinerja Pelayanan Sangat Baik, dari pengelolaan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I di Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan yang dilaksanakan Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Hasil Survei Bagian Risalah,Persidangan dan Publikasi Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Risalah,Persidangan dan Publikasi terkait fasilitasi Monitoring Pelayanan Fasilitasi Pelaksanaan rapat persidangan DPRD yang dilaksanakan oleh Bagian Risalah, dimana responden yang yang dijadikan sampel berjumlah 25 orang, berdasarkan katagori jenis kelamin : Laki-laki berjumlah 21 orang dan Perempuan berjumlah 4 orang dengan spesifikasi Pendidikan S2 4 Orang S1 sebanyak orang 12 dan SMA/ sederajat sebanyak 9 orang dengan pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Balangan. Berikut adalah hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bagian Risalah,Persidangan dan Publikasi dimana beberapa responden memberikan penilaian rendah terhadap produk, spesifikasi jenis pelayanan dengan nilai NRR/Unsur sebesar 3.24 sedangkan rata-rata responden memberikan penilaian yang tinggi pada kompetensi pelaksanaan dengan nilai NRR/Unsur sebesar 3,56 karena Fasilitasi Pelaksanaan yang diselenggarakan oleh Bagian Risalah,Persidangan dan Publikasi di nilai mampu dengan baik memfasilitasi seluruh kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Hal ini dapat di lihat tabel berikut :



Tabel 3.1

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Persyaratan	0.36
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	0.36
3	Waktu Pelayanan	0.37
4	Biaya / Tarif	0.33
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	0.33
6	Kompetensi Pelaksana	0.39
7	Perilaku Pelaksana	0.37
8	Sarana dan Prasarana	0.33
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.39

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa nilai tertinggi diantara ke-9 unsur pelayanan tersebut terletak pada unsur ke 6, dan 7 yaitu unsur Kompetensi pelaksana dan produk spesifikasi jenis pelayanan dengan tingkat kualitas pelayanan puas yaitu 3.56. Sedangkan nilai terendah adalah 3.24 pada unsur ke-8 yaitu Sarana dan Prasarana . Untuk nilai survei terendah Telah berkoordinasi dengan sub bidang Umum dan Rumah Tangga Sekretariat DPRD Balangan, tentang kebutuhan sarana penggandaan dokumen yang kurang baik hasil cetakkannya serta perlengkapan penunjang persidangan yang banyak hilang sehingga mengganggu kelancaran acara fasilitasi persidangan.

2. Hasil Survei Bagian Kajian Perundang-undangan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Kajian Perundang-undangan terkait fasilitasi Pelayanan Pembahasan Rancangan Peraturan daerah dan DPRD yang dilaksanakan oleh Bagian Kajian Perundang-undangan, dimana responden yang dijadikan sampel berjumlah 25 orang, berdasarkan katagori jenis kelamin : Laki-laki berjumlah 21 orang dan Perempuan berjumlah 4 orang dengan spesifikasi Pendidikan S2 4 Orang S1 sebanyak orang 12 dan SMA/ sederajat sebanyak 9 orang dengan pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Balangan. Berikut adalah hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bagian Kajian Perundang-undangan dimana beberapa responden memberikan penilaian rendah terhadap Waktu pelayanan dengan nilai NRR/Unsur sebesar 3.04 sedangkan rata-rata responden memberikan penilaian yang tinggi pada unsur Perilaku Pelaksana dengan nilai NRR/Unsur Sistem mekanisme prosedur sebesar 3,96 karena Tindak lanjut

penyelesaian administrasi kegiatan DPRD di anggap baik oleh anggota DPRD baik dari memfasilitasi kegiatan perjalanan dinas ,maupun rapat serta dokumen raperda yang hendak di kaji,kedepan akan lebih memperbaiki lagi pelaksanaan administrasi pelaksanaan kegiatan di bidang Kajian Perundang- undangan.

lihat tabel berikut :

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Persyaratan Sistem, Mekanisme dan	0.36
2	Prosedur	0.29
3	Waktu Pelayanan	0.38
4	Biaya / Tarif	0.31
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	0.36
6	Kompetensi Pelaksana	0.37
7	Perilaku Pelaksana	0.40
8	Sarana dan Prasarana	0.26
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.38

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa nilai tertinggi diantara ke-9 unsur pelayanan tersebut terletak pada unsur ke-3 dan 9 yaitu Perilaku pelaksana dan waktu pelayanan, dengan tingkat kualitas pelayanan puas yaitu 3.64. Sedangkan nilai terendah adalah 3.04 pada unsur ke-2 yaitu Prosedur pelayanan . Untuk nilai survei terendah telah evaluasi internal di sub bidang perundang-undangan ,dimana koordinator pelaksanaan kegiatan sosrap kurang aktif dan mematuhi prosedur penatausahaan sehingga pertanggungjawaban belanja kegiatan tersebut .

3. Hasil Survei Bagian Fasilitasi Pengawasan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Fasilitasi Pengawasan terkait fasilitasi Monitoring Pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian Fasilitasi Pengawasan, dimana responden yang yang dijadikan sampel berjumlah 25 orang, berdasarkan katagori jenis kelamin : Laki-laki berjumlah 21 orang dan Perempuan berjumlah 4 orang dengan spesifikasi Pendidikan S2 4 Orang S1 sebanyak orang 12 dan SMA/ sederajat sebanyak 9 orang dengan



pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Balangan.. Berikut adalah hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bagian Fasilitasi Pengawasan dimana beberapa responden memberikan penilaian rendah terhadap sarana dan prasarana NRR/Unsur sebesar 3,20 sedangkan rata-rata responden memberikan penilaian yang tinggi pada Kompetensi pelaksanaan dengan nilai NRR/unsur sebesar 3,56 ,karena tenaga administrasi sub kegiatan reses yang tepat waktu di fasilitasi sesuai dengan tanggal pelaksanaan.Lihat Tabel berikut ini :

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Persyaratan	0.39
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	0.40
3	Waktu Pelayanan	0.39
4	Biaya / Tarif	0.39
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	0.39
6	Kompetensi Pelaksana	0.39
7	Perilaku Pelaksana	0.36
8	Sarana dan Prasarana	0.35
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.38

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa nilai tertinggi diantara ke-9 unsur pelayanan tersebut terletak pada unsur ke-2 yaitu sistem, mekanisme dan prosedur , dengan tingkat kualitas pelayanan puas yaitu 3,64. Sedangkan nilai terendah adalah 3,20 pada unsur ke-8 yaitu sarana dan prasarana . Untuk nilai survei terendah telah dilakukan evaluasi dan permintaan akan kebutuhan fasilitasi sarana computer dan printer yang memadai untuk mempercepat penyelesaian administrasi .

4. Hasil Survei Bagian Fasilitasi Penganggaran Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Fasilitasi Penganggaran terkait fasilitasi Monitoring Pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian Fasilitasi Penganggaran, dimana responden yang dijadikan sampel berjumlah 25 orang, berdasarkan katagori jenis kelamin : Laki-laki berjumlah 21 orang dan Perempuan berjumlah 4 orang dengan spesifikasi Pendidikan S2 4 Orang S1 sebanyak 12 orang dan SMA/ sederajat sebanyak 9 orang dengan pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Balangan. Berikut adalah hasil Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM) Bagian Fasilitasi Penganggaran dimana beberapa responden memberikan penilaian rendah terhadap prosedur ,waktu pelayanan dengan nilai NRR/Unsur sebesar 3.00 sedangkan rata-rata responden memberikan penilaian yang tinggi 3.88 pada sarana dan prasarana dengan nilai NRR/Unsur Kompetensi Pelaksanaan sebesar 3,88 ,karena Sarana dan prasarana pelayanan fasilitasi rapat anggaran yang cukup baik .

Lihat Tabel berikut

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Persyaratan	0.37
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	0.33
3	Waktu Pelayanan	0.38
4	Biaya / Tarif	0.34
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	0.33
6	Kompetensi Pelaksana	0.37
7	Perilaku Pelaksana	0.33
8	Sarana dan Prasarana	0.43
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.40

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa nilai tertinggi diantara ke-9 unsur pelayanan tersebut terletak pada unsur ke-8 yaitu unsur sarana dan prasarana, dengan tingkat kualitas pelayanan puas yaitu 3,88. Sedangkan nilai terendah adalah 3.00 pada unsur ke-2 yaitu Prosedur ,waktu pelayanan . Untuk nilai survei terendah telah dilakukan evaluasi dan perbaikan berkala di bidang fasilitasi penganggaran karena sifat pelayanan fasilitasi anggaran ini menunggu koordinasi dengan badan anggaran dan Bapeda sesuai jadwal pembahasan anggaran.

5. Hasil Survei Bagian Umum Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Umum terkait fasilitasi Monitoring Pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum, dimana responden yang dijadikan sampel berjumlah 25 orang, berdasarkan katagori jenis kelamin : Laki-laki berjumlah 21 orang dan Perempuan berjumlah 4 orang dengan spesifikasi Pendidikan S2 4 Orang S1 sebanyak orang 12 dan SMA/ sederajat



Anggota DPRD Kabupaten Balangan. Berikut adalah hasil Survei Kepuasan Masyarakat Bagian Umum dimana beberapa responden memberikan penilaian rendah terhadap penanganan pengaduan, sarana dan masukan dengan nilai NRR/Unsur sebesar 3.04 sedangkan rata-rata responden memberikan penilaian yang tinggi pada unsur persyaratan dengan nilai NRR/Unsur Kompetensi Pelaksanaan sebesar 3.52 ,karena unsur persyaratan terkait dengan fasilitasi pelayanan BPJS dan MCU dewan yang sudah baik di anggarkan dan di damping saat pelaksanaan .Lihat Tabel berikut ini :

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Persyaratan	0.39
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	0.38
3	Waktu Pelayanan	0.33
4	Biaya / Tarif	0.38
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	0.34
6	Kompetensi Pelaksana	0.36
7	Perilaku Pelaksana	0.36
8	Sarana dan Prasarana	0.37
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.33

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa nilai tertinggi diantara ke-9 unsur pelayanan tersebut terletak pada unsur ke-9 yaitu unsur persyaratan , dengan tingkat kualitas pelayanan puas yaitu 3,52. Sedangkan nilai terendah adalah 3.04 pada unsur ke-9 yaitu penanganan pengaduan ,sarana dan masukan . Untuk nilai survei terendah telah dilakukan evaluasi dan perbaikan berkala pada penanganan pengaduan fasilitas ruangan komisi,saat ini bidang rumah tangga sedang masuk tahap penyediaan sarana dan prasarana Gedung utama setelah tahun lalu di lakukan renovasi di tahun 2023 masuk tahap mengisi sarana dan fasilitas ruang rapat kerja di Gedung utama.

6. Hasil Survei Bagian Program dan Keuangan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian program dan Keuangan terkait fasilitasi Monitoring Pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian Program dan keuangan, dimana responden yang yang dijadikan sampel berjumlah 25 orang, berdasarkan katagori jenis kelamin : Laki-laki berjumlah 21 orang dan Perempuan berjumlah 4 orang dengan spesifikasi



Pendidikan S2 4 Orang S1 sebanyak orang 12 dan SMA/ sederajat Anggota DPRD Kabupaten. Berikut adalah hasil Survei Kepuasan Masyarakat Bagian Program dan Keuangan dimana beberapa responden memberikan penilaian rendah terhadap penanganan aduan dengan nilai NRR/Unsur sebesar 3.20 sedangkan rata-rata responden memberikan penilaian yang tinggi pada unsur biaya dan tarif nilai NRR/Unsur sebesar 3,64, biaya dan tarif yang di nilai cukup memadai sampai fasilitas anggaran perubahan terhadap rencana kerja DPRD yang tertuang dalam perencanaan dan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD tahun 2023, tingginya mobilitas perjalanan dinas keluar daerah sehingga ada sub kegiatan yang tidak mencukupi sampai anggaran perubahan ,hal ini di akui seluruh anggota DPRD karena mereka sendiri tidak konsisten dari rencana DPRD yang di sepakati di tahun 2022.

.Lihat Tabel berikut ini :

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Persyaratan Sistem, Mekanisme dan	0.38
2	Prosedur	0.40
3	Waktu Pelayanan	0.40
4	Biaya / Tarif	0.40
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	0.36
6	Kompetensi Pelaksana	0.36
7	Perilaku Pelaksana	0.40
8	Sarana dan Prasarana	0.40
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.35



Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa nilai tertinggi diantara ke-9 unsur pelayanan tersebut terletak pada unsur ke- 8 yaitu unsur biaya dan tarif penatausahaan keuangan dan perencanaan di Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan , dengan tingkat kualitas pelayanan puas yaitu 3,64. Sedangkan nilai terendah adalah 3.20 pada unsur ke-9 yaitu Penanganan aduan. Untuk nilai survei terendah telah dilakukan evaluasi dan koordinasi dengan anggota DPRD tentang pengertian dan prosedur penatausahaan keuangan yang terkendala sistem aplikasi sehingga menghambat alur laju pencairan dana , serta rencana kerja DPRD yang tidak bisa di penuhi karena terbentur dalam Renja Sekretariat DPRD tahun 2023.

Hal ini lah yang menjadi polemik perbedaan pemahaman dengan sub bidang Program dan keuangan yang di anggap kurang baik tanggap dalam penanganan aduan yang di hendaki oleh anggota DPRD tersebut.



## **PROGRES PERBAIKAN**

### **Analisa Masalah.**

Faktor timbulnya berbagai masalah yang ada dilapangan dalam kegiatan survei IKM dapat bermacam-macam. Namun berdasarkan pengamatan dan evaluasi yang diperoleh, penyebab yang dianggap paling dominan terhadap timbulnya masalah tersebut dapat disajikan uraian : Dengan nilai unsur 3,04, unsur waktu pelayanan dan perilaku pelaksanaan masuk dalam kategori Kurang Baik. Hal ini menunjukkan masih kurang kompetensinya pelaksana administrasi penatausahaan keuangan maupun administrasi umum lainnya,serta perilaku pelaksananya yang kurang tanggap dalam memfasilitasi pelaksanaan pelayanan terhadap DPRD.

### **Pemecahan Masalah.**

Berdasarkan analisa permasalahan tersebut diatas, berikut alternatif pemecahan masalah guna menjawab tuntutan akan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkesinambungan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan yaitu : Penyediaan sarana dan prasarana Gedung utama agar maksimal dapat di penuhi tahun 2023 dan dapat di gunakan sesuai dengan peruntukannya.

### **Anggaran.**

Tahun anggran 2023 Murni Rp.47.473.676.326 sampai laporan SKM semester I ini di buat rata capaian sub kegiatan 59,76 % dengan realisasi anggaran Rp.21.355.550.242,- Rencana kerja DPRD terfasilitasi dengan maksimal sampai bulan Juni 2023, ada sub kegiatan yang tidak mencukupi anggarannya sampai perubahan 2023.



## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan Pemerintah Daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan yang ada pada Sembilan Unsur sebesar 83.76 dan berada pada kategori pelayanan kinerja Sangat Baik.

### **4.2. REKOMENDASI**

Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan akses dalam mengajukan keluhan melalui sistem Website DPRD , Goegel form kuisioner IKM dan kotak saran yang di sediakan dan di evaluasi per triwulan .

Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap Unit pelayanan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan pada waktu yang akan datang bisa lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas, keramahan, sopan santun melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja dalam rangka memberikan pelayanan yang prima. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan dan kecepatan pelayanan kepada pelanggan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah: - Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas, - Memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan. Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk meningkatkan prestasinya di masa yang akan datang serta mempertimbangkan untuk memberikan reward/penghargaan kepada unit pelayanan yang sudah melaksanakan pelayanan dengan sangat baik.

Tahun 2023 ini kami dari Sekretariat DPRD Balangan sudah mengupayakan perbaikan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana sesuai permintaan anggota DPRD



Balangan,walaupun belum begitu maksimal tetapi sudah berupaya kearah yang lebih baik.

Sarana ruang komisi / fraksi DPRD telah di rehab dan dalam tahap pemenuhan sarana peralatan penunjang kerja komisi.

Dengan harapan di tahun 2023 akan lebih baik lagi pelayanan yang di fasilitasi oleh Sekretariat DPRD Balangan.

Bersama ini kami lampirkan photo-photo sarana Gedung yang telah di perbaiki.

## LAMPIRAN





Ruang rapat komisi





Ruang Komisi





Ruang Komisi





Selasar Gedung Bawah





Toilet Gedung Utama

DPA Tahun 2023 untuk fasilitasi sarana dan prasarana lanjutan tahun 2022.



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN (%)	
	Service kendaraan lain kode 4 Spesifikasi :	1 Kali	Orang/Kali	4.200.000	0	Rp15.000.000
<b>5.1.02.03.02.0028</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua</b>					<b>Rp4.488.000</b>
	[#] Sumber Dana :					Rp4.488.000
	[+] Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Spesifikasi : Roda 2	12 Kali	Buah	374.000	0	Rp4.488.000
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>					<b>Rp218.075.000</b>
	Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya					
	Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Lokasi : Kab. Balangan					
	Keluaran Sub Kegiatan :					
	Indikator					
	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					20 Unit
	Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember					
	Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp3.721.545.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp94.850.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp53.100.000</b>
<b>5.1.02.02.06</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>					<b>Rp23.100.000</b>
<b>5.1.02.02.06.0001</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural</b>					<b>Rp23.100.000</b>
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana :					Rp3.721.545.000
	[+] Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Papan gedung kantor					
	Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	paket	7.700.000	0	Rp7.700.000
	[+] Jasa Konsultansi Perencanaan rehab ruang rapat kerja					
	Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	paket	7.700.000	0	Rp7.700.000
	[+] Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Ruang Paripurna					
	Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	paket	7.700.000	0	Rp7.700.000
<b>5.1.02.02.08.0018</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur</b>					<b>Rp30.000.000</b>
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana :					Rp30.000.000
	[+] Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Papan gedung kantor					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
	[+] Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Ruang Rapat Kerja					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
	[+] Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Ruang Paripurna					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp3.468.465.000</b>
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp3.468.465.000</b>
<b>5.1.02.03.03.0001</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp62.040.000</b>
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana :					Rp3.468.465.000
	[+] Pemeliharaan Gedung Kantor					
	Rehab Bangunan Spesifikasi : Bangunan Sedehana	24 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	2.750.500	0	Rp66.204.000
	[+] Rehab Papan Gedung Kantor					
	Rehab Bangunan Spesifikasi : Bangunan Sedehana	72 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	2.750.500	0	Rp198.612.000
	[+] Rehab Ruang Rapat Paripurna					
	Rehab Bangunan Spesifikasi : Bangunan Sedehana	72 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	2.750.500	0	Rp198.612.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN (%)	
	Service kendaraan lain kode 4 Spesifikasi :	1 Kali	Orang/Kali	4.200.000	0	Rp15.000.000
<b>5.1.02.03.02.0028</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua</b>					<b>Rp4.488.000</b>
	[#] Sumber Dana :					Rp4.488.000
	[+] Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Spesifikasi : Roda 2	12 Kali	Buah	374.000	0	Rp4.488.000
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>					<b>Rp218.075.000</b>
	Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
	Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Lokasi : Kab. Balangan					
	Keluaran Sub Kegiatan :					
	Indikator					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit
	Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember					
	Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp3.721.545.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp94.850.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp53.100.000</b>
<b>5.1.02.02.06</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>					<b>Rp23.100.000</b>
<b>5.1.02.02.06.0001</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural</b>					<b>Rp23.100.000</b>
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana :					Rp3.721.545.000
	[+] Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Papan gedung kantor					
	Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	paket	7.700.000	0	Rp7.700.000
	[+] Jasa Konsultansi Perencanaan rehab ruang rapat kerja					
	Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	paket	7.700.000	0	Rp7.700.000
	[+] Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Ruang Paripurna					
	Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	paket	7.700.000	0	Rp7.700.000
<b>5.1.02.02.08.0018</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur</b>					<b>Rp30.000.000</b>
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana :					Rp30.000.000
	[+] Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Papan gedung kantor					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
	[+] Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Ruang Rapat Kerja					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
	[+] Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Ruang Paripurna					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp3.468.465.000</b>
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp3.468.465.000</b>
<b>5.1.02.03.03.0001</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp62.040.000</b>
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana :					Rp3.468.465.000
	[+] Pemeliharaan Gedung Kantor					
	Rehab Bangunan Spesifikasi : Bangunan Sedehana	24 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	2.750.500	0	Rp66.204.000
	[+] Rehab Papan Gedung Kantor					
	Rehab Bangunan Spesifikasi : Bangunan Sedehana	72 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	2.750.500	0	Rp198.612.000
	[+] Rehab Ruang Rapat Paripurna					
	Rehab Bangunan Spesifikasi : Bangunan Sedehana	72 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	2.750.500	0	Rp198.612.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	

<b>[ - ] Reha Ruang rapat kerja</b>						
	Rehab Bangunan	72 M2	M2	2.758.500	0	Rp198.612.000
	Spesifikasi : Bangunan Sederhana					
<b>[ # ] Rehab Gedung Sederhana</b>						<b>Rp3.006.425.000</b>
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
<b>[ - ] Jasa Konsultansi Pengawasan rehab gedung sederhana</b>						
	Pengawasan	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp35.000.000
	Spesifikasi :					
<b>[ - ] Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab gedung sederhana</b>						
	Perencanaan	1 Paket	Paket	75.000.000	0	Rp75.000.000
	Spesifikasi :					
<b>[ - ] Rehab Gedung DPRD</b>						
	Rehab Bangunan	1050 M2	M2	2.758.500	0	Rp2.896.425.000
	Spesifikasi : Bangunan Sederhana					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						<b>Rp3.731.585.000</b>
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						<b>Rp4.426.530.550</b>

Rencana Penerimaan Dana per Bulan		Paripipil, tanggal 29 Desember 2022 <b>SEKRETARIS DPRD</b>  <u>H. TAHMIDH, S.Sn., SE.</u> <b>Wakil</b> NIP: 197312241994031007  Mengesahkan, <b>PRWD</b>  <u>FAKHRIYANTO, S.P., MP</u> NIP: 197806012005011016
Januari	Rp228.023.600	
Februari	Rp0	
Maret	Rp31.500.000	
April	Rp3.953.553.000	
Mai	Rp6.500.000	
Juni	Rp0	
Juli	Rp206.953.950	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp4.426.530.550	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. SUTIKNO, AP, M.AP	197604171994121001	Ketua TAPD	
2.	FAKHRIYANTO, S.P., MP	197806012005011006	Wakil Ketua I TAPD	
3.	RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP	197012071995031002	Wakil Ketua II TAPD	



Pelatihan Pengelolaan Arsip di Sekretariat DPRD Kab.Balangan.



